

LAYAKKAH MODEL SHAREHOLDER DAN STAKEHOLDER DITERAPKAN DI INDONESIA?

Baihaqi Aksa, Fajar Muhammad Imam Sulaeman, Eka Fitriani Nikmatul Ulfa

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author: 18108040016@student.uin-suka.ac.id

Artikel Info

Article history:

Received 08 June 2021

Revised 18 August 2021

Accepted 30 August 2021

Available online 31 August 2021

Keyword: *Corporate Governance Models; Convergence; Indonesian Characteristic*

JEL Classification:

O1, O5, F2, L1

Abstract

Corporate governance is an important thing in succeeding the vision of the mission and the future of the company. The systematic governance of each company varies due to differences in the character and culture of a country. However, each model still has weaknesses so that currently some of the researchers are researching the convergence between corporate governance models. Therefore, this paper discusses various models of corporate governance such as stakeholder, shareholder and continental models as well as the concept of corporate governance convergence. The purpose of writing this paper first, to know the characteristics of each model as well as how much influence the concept of corporate governance convergence. After successfully exceeding the first goal researchers are also interested to know what is the right corporate governance model to applied on the industry in Indonesia. The method used in writing this paper uses literature studies that use the technique of collecting data library or literature that has been available to be studied and processed as research materials in accordance with the theme.

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan secara teori dapat kita definisikan sebagai lembaga yang memberikan pengaruh pada pengelolaan sumber daya dan keuntungan pada sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai struktur dan proses pengarahan dan pengendalian perusahaan agar berjalan lebih efisien dan membuat perusahaan lebih akuntabel dan transparan kepada investor (World Bank, 2015). EU Commission mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian aturan, hukum dan prosedur yang mengatur hubungan antara pemilik, dewan direksi, manajer senior dan dan pihak lain yang berperan dalam pengambilkeputusan (Communities, 2002). Definisi serupa juga diberikan oleh (Demise, 2006) bahwa penetapan dan pemantauan struktur tata kelola perusahaan mengikutsertakan kontribusi antara dewan direksi, manajemen perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem tata kelola perusahaan di berbagai negara di dunia memiliki sistem yang berbeda, akan tetapi secara umum dapat dikategorikan dalam dua model dominan, yaitu model pemegang saham dan pemangku kepentingan (Shirwa, 2020).

Kedua model ini mewakili dua jenis kepemilikan saham. Model pemegang saham yang banyak digunakan di Anglo-Amerika diartikan sebagai investor memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan (Shirwa, 2020). Sedangkan model pemangku kepentingan yang

lazim digunakan di Jepang dan juga di benua Eropa, sistem pengambilan keputusannya diwakili oleh semua pemangku kepentingan, tidak hanya dari pemegang saham (Palmer, 2011).

Ketika konvergensi antar model mulai diperdebatkan, model Anglo-Amerika (pemegang saham) mendominasi negara Amerika Serikat pasca PD II. Sejak saat itu pendukung konvergensi yang khususnya model Anglo-Amerika berpikir bahwa sudah waktunya dunia menyatu dengan model Anglo-Amerika (pemegang saham). Namun, setelah Jerman dan Jepang muncul sebagai negara manufaktur kekuatan besar, gagasan untuk menyatu dengan model AS mundur selangkah (Shirwa, 2020).

Beberapa peneliti berpendapat bahwa pendapat konvergensi timbul akibat hasil persaingan yang mengutamakan model *corporate governance* yang menghasilkan efektifitas ekonomi yang tinggi dan meningkatnya dominasi politik kepentingan keuangan Amerika Serikat (O'sullivan, 2000). Sedangkan, Shirwa, (2020) berpendapat bahwa perdebatan konvergensi yang cukup lama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya, politik, ekonomi, adat istiadat sebagaimana yang ia teliti.

Para ahli yang setuju dan kontra dengan konsep konvergensi ini memiliki alasannya sendiri-sendiri. Beberapa argumen peneliti yang setuju terhadap konvergensi adalah perbedaan dari berbagai model tata kelola perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk menggabungkan dua model supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara menutupi kekurangan model satu dengan model lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Clements et al., 2016; Reinhold et al., 2006; Shirwa, 2020). Sedangkan beberapa pendapat kontra mengenai konsep konvergensi ini didasarkan pada perbedaan berbagai faktor fundamental dan berpengaruh, termasuk norma filosofis, sosial, hukum, lingkungan dan budaya. Kondisi tersebut berdampak pada pengambilan makna dan pemahaman yang berbeda mengenai konsep tata kelola perusahaan sehingga konsep konvergensi akan sulit untuk direalisasikan (Letza et al., 2008; Reddy, 2009).

Artikel ini mencoba menjelaskan dan menganalisis model tata kelola perusahaan Anglo-Saxon, Continental dan Japanese. Apakah konvergensi ini memiliki dampak pada system tata kelola perusahaan? Dengan mengumpulkan beberapa argumen analisis model tersebut peneliti ingin menyesuaikan model seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Peninjauan ini dilakukan oleh peneliti karena tertarik dengan beberapa hasil penelitian, perdebatan konvergensi, dan karakteristik negara Indonesia yang beragam. Dimana diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai strategi perusahaan dalam memilih model tata kelola perusahaan dan menjadi sumber wawasan di bidang tata kelola perusahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dengan penjelasan karakteristik serta perbandingan antara model *Anglo-saxon*, *Japanese* dan *continental*. Bagian 3 akan menjelaskan konvergensi baik dari segi pro dan kontra. Bagian 4 menjelaskan beberapa karakteristik negara Indonesia. Bagian 5 peneliti memaparkan diskusi dan kesimpulan dari data yang berhasil dikumpulkan.

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini menggunakan studi literatur. Studi dalam KBBI diartikan sebagai penelitian ilmiah dan Literatur diartikan sebagai data yang digunakan dalam aktifitas intelektual ataupun seni. Studi literatur adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data pustaka atau literatur yang telah ada untuk ditelaah dan diolah sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan tema. Menurut (Zed, 2004) studi literatur adalah sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, lalu mengolah data tersebut sebagai bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate-Shareholders model

Shareholders model adalah tipe tata kelola perusahaan yang ditentukan berdasarkan kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. Daily & Dalton, (2003) memaknai shareholders model berkaitan dengan teori shareholders yang menjelaskan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan usaha perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan/pendapatan bagi pemegang saham (Ahmad et al., 2016). Model shareholders ini sering digunakan di daerah Amerika Serikat sehingga lebih dikenal dengan istilah Anglo-American (Palmer, 2011). Selain istilah tersebut masih ada lagi istilah lainnya seperti model Amerika, model sentris pasar, model berbasis ekuitas, model principal-agent, model orang luar dan model keuangan (Ahmad et al., 2016). Model ini lebih sering menimbulkan konflik antara pemegang saham dengan perusahaan.

Sebuah perusahaan beroperasi dengan harapan keuntungan yang besar dengan laporan keuangan yang sedikit tetapi masih menunjukkan laba (Shirwa, 2020). Hal ini terjadi karena semakin sedikit laba yang tercatat maka semakin sedikit pula laba yang dibayar pajak dan dibagikan ke pemegang saham. Tetapi, konsep ini memiliki kelebihan karena terdapat pemisahan tugas sehingga terdapat dua sudut pandang sebagai controlling dan pelaksana. Kondisi ini mengharuskan perusahaan menyajikan laporan perkembangan operasional dan keuangan perusahaan secara transparan kepada publik, pemegang saham (Nakamura, 2016). Model Shareholders memiliki beberapa ciri khas menurut Shirwa, (2020) seperti :

1. Perusahaan besar yang menerapkan model ini diawasi oleh manajemen tetapi kepemilikan kendali terbesar dipegang oleh pemegang saham luar.
2. Model ini memiliki sistem pemisahan bagian kepemilikan dan control yang menyebabkan keseriusan masalah keagenan.
3. Model ini memiliki frekuensi perbedaan dalam pergantian kebijakan yang menjadi bentuk mekanisme disiplin dalam manajemen perusahaan.
4. Kepemilikan saham perusahaan dalam model ini tidak dimiliki oleh perusahaan saja tetapi juga tersebar.
5. Tidak terdapat pemindahan saham minoritas ke pemegang saham mayoritas.
6. Investor perusahaan dalam model ini sangat dilindungi oleh hukum korporasi.

Karakteristik lainya juga diungkapkan oleh Ahmad et al., (2016) bahwa dalam shareholders model kepentingan pemegang saham adalah kewajiban fidusia perusahaan dan menurut Cernat, (2004) dalam model ini kesatuan pekerja hanya memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil/rendah dalam pengelolaan perusahaan.

Stakeholder Model

Negara utama yang menerapkan model pemangku kepentingan ini adalah Jerman dan Jepang. Model pemangku kepentingan atau *stakeholder model* adalah suatu perubahan tata kelola perusahaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Model ini tampil sebagai model yang sangat besar. Dimana pemegang saham dianggap sebagai salah satu pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya dalam perusahaan. Fitur dasar dari model pemangku kepentingan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan demikian model ini mempertimbangkan kepentingan semua kelompok pemangku kepentingan dalam perusahaan, bukan hanya kepentingan pemegang saham (Praveen Bhasa, 2004).

Menurut Moerland, (1995) banyak perusahaan di Jerman tidak dilihat sebagai cara untuk meningkatkan nilai pemegang saham seperti negara Inggris dan Amerika. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai entitas ekonomi yang mempunyai kekuasaan. Dimana terdiri dari berbagai kelompok, seperti manajemen, pemegang saham, karyawan, dan pemasok.

Tata kelola yang berorientasi pada pemangku kepentingan memiliki banyak keuntungan. Hubungan yang stabil dengan pemangku kepentingan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan komitmen dapat memberi orang akses yang langgeng ke sumber daya yang berharga. Selain itu, komitmen yang lebih kuat kepada pemangku kepentingan dapat mendukung inovasi dan pembelajaran organisasi, dan dapat membantu perusahaan menanggapi perubahan. Perusahaan Jerman dapat memiliki lebih banyak pengalaman dan oleh karena itu dapat menggunakan potensi hubungan

pemangku kepentingan dengan lebih efektif (Bottenberg et al., 2017). Stakeholder model juga diterapkan di negara Afrika dan beberapa negara maju di Asia. Karena beberapa negara tersebut memiliki budaya kepedulian, harmoni, keramahan, rasa hormat dan responsif sehingga dalam sistem tata kelola perusahaannya terdapat solidaritas dan kepedulian kepada sesama (Ntongho, 2016).

Selama ini model corporate governance di Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang mengandalkan kepemilikan individu/publik atau investor keluarga. Dari 100 emiten (Tbk.), hampir tidak ada yang ingin mengadopsi model perusahaan PB. Model korporasi Perseroan Terbatas perlu diimbangi dengan model kepemilikan bersama untuk menciptakan peluang kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk itu model pemangku kepentingan ini mewakili seluruh lingkungan mikro dalam sebuah bisnis. Tidak hanya bergantung pada pemegang saham dominan sebuah perusahaan.

Model Good Corporate Governance Continental (Continental European)

Model Good Corporate Governance yang banyak diimplementasikan di berbagai negara seperti Prancis, Belanda, Denmark, Jerman, dan negara di benua Eropa lainnya. Dimana negara-negara tersebut yang Berdasarkan filosofi yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Orientasi stakeholder atau pemangku kepentingan ini mencakup banyak elemen seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok, distributor, dan karyawan.

Dalam model Eropa kontinental ini, kepemilikan pemegang saham sangat terkonsentrasi pada kepemilikan pemegang saham minoritas (institusional). Maka kepemilikannya akan sangat besar, dan karenanya berdampak besar terhadap hak suara yang dimiliki. Oleh karena itu menyebabkan perusahaan dapat dikendalikan dan pengambilan keputusan perusahaan ditentukan oleh sejumlah kecil pemegang saham. Kepemilikan saham yang bersifat kepemilikan institusional memiliki beberapa keunggulan dibandingkan investor lain. Biasanya, agensi mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan investasi kepada departemen tertentu agar agensi dapat memantau perkembangannya secara profesional. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan oleh pemegang saham institusional dapat digunakan untuk mengekang praktik manajemen laba.

Continental European model memiliki struktur governance yang terdiri dari RUPS. Manajer Eksekutif (manajemen) dan Dewan Komisaris, Dewan Direktur. Model Continental Europe ini memisahkan Keanggotaan dewan direksi dengan Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris bertugas sebagai dewan pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Menurut KNKG, (2006) bahwa dalam sistem kepengurusan PT di Indonesia menggunakan two board system dimana setiap dewan (Direksi/Komisaris) memiliki tugas dan fungsinya masing-masing seperti yang tertuang dalam anggaran dasar dan Perpu. Namun, dalam struktur governance di Indonesia penerapan two board system ini berbeda dengan Model Continental Europe. Karena, RUPS sendiri yang mengatur mengenai

wewenang pangkat dan pembekuan ataupun pemberhentian Dewan Direksi itu sendiri.

Konvergensi corporate governance

konvergensi dalam tata kelola perusahaan berarti menyelaraskan standar atau konsep dua model untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara menutupi kekurangan model satu dengan model lainnya. Konvergensi sistem tata kelola perusahaan memiliki berbagai pro dan kontra dimana tidak memungkinkan untuk mencapai konsensus dalam menselaraskannya. Peneliti pada umumnya mengutamakan praktik produksi, pekerjaan dan pemasaran yang sama untuk memberikan insentif pada lingkungan yang kompetitif.

Argumen yang mendukung konsep konvergensi terutama pada model Anglo-Amerika sudah dipastikan keunggulannya dan sangat disarankan negara lain mengadopsi model Anglo-Amerika. Dasar argumennya adalah model Anglo-Amerika lebih bisa memberikan dampak yang besar dari pada model saingannya pada perang dunia II. Argumen tersebut juga di afirmasi dalam kasus yang berbeda oleh peneliti (Fernández Sánchez et al., 2020). Mereka berargumen dengan dasar adanya peningkatan mekanisme corporate governance pada seluruh sistem perbankan tepatnya saat krisis keuangan. Adanya konvergensi dapat meningkatkan keefektifitasan yang bisa mengurangi kesenjangan efektifitas common law system dan civil law system. Sedangkan, argumen yang menolak konvergensi berpendapat bahwasannya sangat tidak mungkin sistem tata kelola yang konvergen. Sebab kerangka dasar dan sistem keuangan negara menjadi indikasi sulitnya melihat konvergensi model tata kelola perusahaan dalam arti yang sebenarnya. Setiap negara memiliki culture, budaya, ekonomi, hukum dan sistem tata negara yang berbeda-beda karena setiap negara akan menyesuaikan gayanya sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Rossouw, J and Padayachee, (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi tata kelola sebuah perusahaan, yaitu pola kepemilikan, pandangan yang berlaku tentang peran perusahaan dalam masyarakat, budaya dan sosial, serta sosial dan politik. Pengaruh dari faktor-faktor ini membuat konvergensi sulit untuk diwujudkan karena perusahaan tidak memiliki berbagai pandangan yang menjadi faktor sulitnya mewujudkan sebuah konvergensi tata kelola perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya penelitian dari Allen, (2014) yang berpendapat bahwa konvergensi memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan makanan tetapi perlu ditentukan oleh prinsip etika, sosial dan budaya. Ntongho, (2016) menyatakan bahwa budaya berpengaruh pada konvergensi tata kelola perusahaan. Begitu pula dengan Liker, (2004) menemukan banyak literatur yang menolak penerapan konvergensi tetapi penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konvergensi dan divergensi dapat berkembang dan

meningkatkan perbedaan sistem dan pengaturan tata kelola perusahaan. Lattemann, (2014) juga menyimpulkan bahwa konvergensi dan model tata kelola perusahaan lainnya memiliki pengaruh terhadap perkembangan kualitas tata kelola perusahaan. Beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut yakni konvergensi dapat mempengaruhi perkembangan dan sistem tata kelola perusahaan jika didukung oleh prinsip etika, sosial dan budaya yang sesuai.

Karakteristik Indonesia

Bidang Sosial Budaya

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 500 suku bangsa (Abdullah, 2003). Terlihat dari jumlah suku bangsanya dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang berkembang di setiap daerah. Kondisi Indonesia ini diabadikan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Keragaman budaya ini menghasilkan perbedaan setiap suku dan individu mulai dari sudut pandang, norma dan nilai-nilai yang berlaku, serta perbedaan tingkah laku, sosial dan ekonomi (Abdullah, 2003). Karakteristik budaya lokal yang dilansir dalam laman tirto.id diantaranya :

1. Memiliki unsur penggabungan pengetahuan kebaikan yang mampu mengajarkan seseorang mengenai etika dan nilai moral.
2. Memiliki unsur untuk mengajar orang mencintai dan merawat alam bukan untuk merusaknya.
3. Budaya lokal berasal dari nenek moyang atau komunitas yang lebih dahulu ada.
4. Budaya lokal meliputi nilai, norma, etika, adat istiadat, hukum, kepercayaan, dan aturan khusus.

Budaya menurut Taylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* (1871) merupakan segala aktivitas manusia diantaranya kepercayaan, seni, moral, pengetahuan, hukum, adat istiadat dan kebiasaan lainnya (Sardar, 1997). Budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peradaban. Peradaban merupakan puncak dari kebudayaan. Apabila dikaitkan dengan bahasa barat budaya berasal dari bahasa latin “Colere” yang artinya mengolah, mengerjakan. Jika ditinjau lebih luas memiliki makna mengolah alam. Kebudayaan mengolah alam menggunakan teknologi, kemampuan akal seperti ekonomi dan industri. Dalam pengelolaan industri jika dilihat dari segi budaya maka akan muncul istilah gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam mengelola perusahaan pasti memerlukan teori dan kebijakan yang berbeda, model atau sistem tata kelola perusahaan yang sesuai sehingga menghasilkan kesimpulan dan analisis yang relevan dan reliable (Kustyarini, 2014).

Keterkaitan budaya dengan sistem industri ini telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Indriyati, (2018) dalam hasil penelitiannya indriyanti menjelaskan bahwa dalam meningkatkan manajemen mutu juga diperlukan

peningkatan aspek kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Wahyuni, (2015) juga menjelaskan hasil penelitiannya bahwa gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi kerja memiliki pengaruh atas peningkatan kinerja pegawai.

Bidang Ekonomi

Sistem dan pertumbuhan ekonomi setiap negara pasti berbeda-beda, beberapa negara memiliki kondisi ekonomi yang baik, dan beberapa negara diantaranya memiliki kondisi ekonomi belum begitu baik. Besaran PDB (Produk Domestik Bruto) di suatu negara merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang ada di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Sampai saat ini Indonesia sendiri termasuk dalam negara berkembang dengan berbagai karakteristik, seperti pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama, masih rendahnya tingkat industrialisasi, dan tingginya tingkat pengangguran.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan karakteristik ekonomi negara berkembang dan sering disebut sebagai *emerging market country*. Menurut data *The International Monetary Fund* (IMF) diantara 10 *emerging market country* terbesar, Pada tahun 2019 Indonesia memiliki nilai PDB terbesar ke-7, dengan nilai PDB sebesar USD 3.55 triliun. Hal tersebut mencerminkan salah satu kondisi yang dapat menunjukkan bahwa potensi berkembangnya perekonomian Indonesia sangat besar kedepannya. Meskipun pada masa sekarang Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, perekonomian indonesia setidaknya masih dapat optimis untuk tumbuh. Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi indonesia membaik yaitu keikutsertaan penghasilan UMKM yang berhasil meningkatkan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk 3 tahun terakhir sebesar 50% dimana tumbuh sekitar 4,2% setiap tahunnya (Soetjipto, 2020). Selain itu sektor industri juga banyak berkontribusi pada struktur produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya. Dimana pada kuartal II tahun 2020 sektor industri menyumbang 19% untuk PDB.

Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan nilai ekonomi jangka panjang. Bukan hanya untuk pemangku kepentingan dalam perusahaan dan industri lainnya, melainkan bagi para pemegang saham atau investor akan merasakan dampak baiknya. Mengingat di Indonesia sendiri jumlah perusahaan besar menengah tercatat pada tahun 2017 mencapai 33577 perusahaan (BPS, 2017). Sedangkan perusahaan yang tercatat pada awal 2020 di Bursa Efek Indonesia mencapai 674 perusahaan (BEI, 2020). Maka dari itu, tantangan untuk berbagai industri dan perusahaan dalam memilih model tata kelola perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya.

Bidang Politik

Konvergensi mengacu pada pertemuan antara kedua konsep tata kelola perusahaan dalam satu titik bersama. Latar belakang dan dimensi yang berbeda menjadi salah satu faktor sulitnya konvergensi itu lahir, maka setelah faktor sosial budaya dan faktor ekonomi ada juga faktor politik yang mempengaruhi sulitnya konvergensi dalam tata kelola perusahaan.

Perlu kita ingat, perbedaan pandangan politik suatu negara menjadikan negara-negara di dunia sulit untuk beradaptasi dengan praktik di luar negeri. Indonesia memiliki sistem dan ideologi politik yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Sistem Perpolitikan di Indonesia tak hanya stak seperti yang sekarang. Perkembangan politik Indonesia terus mengalami pembaharuan dan penyesuaian sejak masa prakolonial Indonesia - Masa Penjajahan Indonesia - Orde Lama Soekarno sampai masa pemerintahan otoriter selama \pm 30 tahun. Proses pembaruan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kekuasaan dan politik yang cenderung berpihak kepada masyarakat Indonesia. Periode ini disebut juga masa Reformasi yang ditandai oleh perubahan struktural. Contoh dari perubahan struktural yakni desentralisasi kekuasaan di daerah dan melakukan pembatasan kekuasaan presiden. Maka dari itu divergensi ideologi dan sistem politik Indonesia dengan negara lain menjadikan tantangan bagi negara untuk beradaptasi dengan model dan sistem tata kelola perusahaan di negara lain.

Pasar modal likuid ditambah dengan kuat desain investor institusi dan mendefinisikan kembali terbaik praktik perusahaan melalui peran pemantauan dan kontrol mereka yang terbaik (Praveen Bhasa, 2004). Secara keseluruhan, negara-negara di dunia tidak melepaskan kepentingan politiknya hanya demi konvergensi yang dimana sektor politik menjadi perbedaan yang utama dalam topik konvergensi. Kondisi politik dalam negeri kebanyakan dipengaruhi oleh literatur tentang penyebaran tata kelola perusahaan dan bentuk organisasi secara umum disertai studi rinci. Politik domestik memediasi hubungan antara tren eksternal atau guncangan dan hasil (Guillen, 2000).

KESIMPULAN

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa model tata kelola perusahaan yang ada di dunia sangatlah beragam. Penelitian yang kami lakukan menggunakan tiga model tata kelola perusahaan yang terkenal dalam *corporate governance model* yaitu *Good Corporate-Shareholders model*, *Stakeholder Model*, dan *Model Good Corporate Governance Continental (Continental European)*. Seiring dengan perkembangan waktu setelah perang dunia II dan keterbatasan dari masing-masing model maka terdapat beberapa peneliti yang mengusulkan konsep konvergensi model tata kelola perusahaan. Hasil dari penelitian dan studi literatur ini dapat diketahui bahwa :

1. Karakteristik setiap model memiliki kelemahan dan kekuatan yang berbeda-beda, Misalnya :
 - a. *Shareholders model* : Pada *shareholders models*, pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang saham. Dimana hal ini membuat transparansi perusahaan ke publik sangatlah jelas. Karena pemegang saham mempunyai wewenang dalam proses perkembangan dan sistem tata kelola perusahaan. Hal ini mengakibatkan keterbukaan perusahaan kepada publik sangatlah baik untuk mencegah kecurangan dan hal-hal yang tidak oleh para investor. Akan tetapi model tata kelola ini sering menimbulkan konflik antar pemegang saham dan perusahaan itu sendiri karena perusahaan tidak mempunyai wewenang sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Sehingga akan ada beberapa pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan manajemen suatu perusahaan. Selain itu *Shareholder model* akan terkena dampak langsung dari apa yang terjadi pada perusahaan, baik perusahaan sedang krisis maupun berkembang. Beberapa negara yang menggunakan model tata kelola ini yaitu Amerika Serikat.
 - b. *Stakeholder Model* : Pada model pemangku kepentingan tidak hanya pemegang saham yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan akan tetapi semua kelompok pemangku kepentingan di suatu perusahaan tersebut. Hal ini membuat mampu mempertimbangkan kesejahteraan semua kelompok yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hubungan yang baik juga akan tercipta dengan pemangku kepentingan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan komitmen yang sama. Selain itu, komitmen yang lebih kuat kepada pemangku kepentingan dapat mendukung inovasi dan pembelajaran organisasi, dan dapat membantu perusahaan mengelola perusahaannya. Akan tetapi mereka dianggap sebagai entitas ekonomi yang mempunyai kekuasaan. Dimana terdiri dari berbagai kelompok, seperti manajemen, pemegang saham, karyawan, dan pemasok. Tidak hanya itu *Stakeholder* memiliki tanggung jawab yang besar serta mempunyai pengaruh terhadap apa yang terjadi pada perusahaan. Dimana *stakeholder* bisa terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari semua kegiatan perusahaan. Berbeda dengan *Shareholder* yang hanya terkena dampak langsung nya saja. Adapun beberapa negara yang menggunakan model *stakeholder* ini diantaranya yaitu Jerman, Jepang, serta Afrika Selatan.
 - c. *Continental European* : model ini banyak digunakan di benua eropa seperti Prancis, Belanda, Denmark dan Jerman. Penerapan *stakeholder* ini unggul dalam kepentingan dengan praktik manajemen laba dapat ditekan melalui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi. Namun, model ini lebih

- fokus pada sejumlah kecil pemegang saham yang memiliki saham besar pada sebuah entitas. Sehingga, akan memicu kesenjangan antara pihak *controlling interest* dan *non-controlling Interest*.
- d. *Convergence* : dalam penerapannya model ini menggabungkan dua model yang telah ada dengan meninjau kekurangan serta kelemahan dari masing-masing model. Model ini belum banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan masih menjadi perdebatan dikalangan peneliti. Hal tersebut dikarenakan karakter budaya, ekonomi, sosial dan politik yang berbeda.
2. Konsep konvergensi dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan sistem tata kelola perusahaan jika didukung oleh prinsip etika, sosial dan budaya yang sesuai. Sehingga, konvergensi dapat berpengaruh dalam meningkatkan keefektifitasan yang bisa mengurangi kesenjangan efektifitas *common law system* dan *civil law system*.

Setelah mengetahui beberapa karakteristik dan pengaruh dari masing-masing model tata kelola yang telah dijabarkan terdapat beberapa pertimbangan seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pemilihan model tata kelola perusahaan. maka kami menyimpulkan bahwasanya model tata kelola perusahaan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia yakni Model *Stakeholder*. Karena model ini tampil sebagai model yang sangat besar dan memiliki fitur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa minimnya model tatakelola yang dibahas dan cakupan wilayah penelitian yang dilakukan hanya terfokus pada negara Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya supaya memperluas cakupan wilayah penelitian dan pembahasan model tatakelola perusahaan di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2003). Pengembangan Metode Studi Islam Dalam Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 6(1), 1–19. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/6101%0Ahttps://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/6101%0Ahttps://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/6101/46>
- Ahmad, S., Omar, R., Ahmad, S., Omar, R., Agyei-mensah, B. K., Ofoeda, I., Gariba, P., Amoah, L., Abdul, T., Dalwai, R., Basiruddin, R., Zaleha, S., & Rasid, A. (2016). *Article information* :
- Allen, P. (2014). *Alternative Agrifood Movements : Patterns of Convergence and Divergence Article information: Users who downloaded this article also*

downloaded :

- BEI. (2020). *Jumlah Investor Saham di Indonesia Priode ketiga*. Bursa Efek Indonesia.
- Bottenberg, K., Tuschke, A., & Flickinger, M. (2017). Corporate Governance Between Shareholder and Stakeholder Orientation: Lessons From Germany. *Journal of Management Inquiry*, 26(2), 165–180. <https://doi.org/10.1177/1056492616672942>
- BPS. (2017). *Jumlah Perusahaan IBS (KBLI 2009) (Unit), 2016-2018*. Badan Pusat Statistik.
- Cernat, L. (2004). The emerging European corporate governance model: Anglo-Saxon, Continental, or still the century of diversity? *Journal of European Public Policy*, 11(1), 147–166. <https://doi.org/10.1080/1350176042000164343>
- Clements, C., Neill, J. D., Wertheim, P., Kelola, T., & Penulis, U. (2016). *Divergensi atau konvergensi : paradoks dalam tata kelola perusahaan ?*
- Communities, C. O. T. E. (2002). *Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development*. 24.
- Daily, C. M., & Dalton, D. A. N. R. (2003). *Introduction To Special Topic Forum Corporate Governance : Decades of Dialogue and Data*. 28(3), 371–382.
- Demise, N. (2006). OECD principles of corporate governance. *Corporate Governance in Japan: From the Viewpoints of Management, Accounting, and the Market, 1998*, 109–117. https://doi.org/10.1007/978-4-431-30920-8_10
- Fernández Sánchez, J. L., Odriozola Zamanillo, M. D., & Luna, M. (2020). How Corporate Governance Mechanisms of Banks Have Changed After the 2007–08 Financial Crisis. *Global Policy*, 11(S1), 52–61. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12748>
- Guillen, M. F. (2000). Corporate Governance and Globalization: Is There Convergence Across Countries. *Advances in International Comparative Management*, 13(September 1999), 175–204.
- Indriyati, R. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen Mutu (Studi pada AKPELNI Semarang). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 51–58. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.614>
- KNKG. (2006). *pedoman umum good corporate governance Indonesia*. 39.
- Kustyarini. (2014). Sastra dan Budaya. *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(2), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/235006-sastra-dan-budaya-9f18ccea.pdf>
- Lattemann, C. (2014). On the convergence of corporate governance practices in emerging markets. *International Journal of Emerging Markets*, 9(2), 316–332. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-06-2013-0093>
- Letza, S., Kirkbride, J., Sun, X., & Smallman, C. (2008). Corporate governance theorising: Limits, critics and alternatives. *International*

- Journal of Law and Management*, 50(1), 17–32.
<https://doi.org/10.1108/03090550810852086>
- Liker, J. K. (2004). No Title الفوقعة. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*, 352.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Moerland, P. W. (1995). Alternative disciplinary mechanisms in different corporate systems. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 26(1), 17–34. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(94\)00018-A](https://doi.org/10.1016/0167-2681(94)00018-A)
- Nakamura, M. (2016). The security market and the changing government role in Japan: Corporate governance issues. *Asian Education and Development Studies*, 5(4), 388–407. <https://doi.org/10.1108/AEDS-09-2015-0044>
- Ntongho, R. A. (2016). culture and corporate governance convergence. *Emerald Insight*, 34(1), 1–5.
- O'sullivan, M. (2000). Corporate Governance and Globalization. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 570(1), 153–172. <https://doi.org/10.1177/000271620057000112>
- Palmer, C. (2011). Has the Worldwide Convergence on the Anglo-American Style Shareholder Model of Corporate Law Yet been Assured? *Opticon1826*, 6(11), 1–12. <https://doi.org/10.5334/opt.111104>
- Praveen Bhasa, M. (2004). Global corporate governance: Debates and challenges. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 4(2), 5–17. <https://doi.org/10.1108/14720700410534930>
- Reddy, Y. R. K. (2009). The ethics of corporate governance: An Asian perspective. *International Journal of Law and Management*, 51(1), 17–26. <https://doi.org/10.1108/17542430910936646>
- Reinhold, C. O., Yoshida, S., Burgdörfer, J., Zhao, W., Mestayer, J. J., Lancaster, J. C., & Dunning, F. B. (2006). Realization of the kicked atom at high scaled frequencies. *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics*, 73(3). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.73.033420>
- Rossouw, J and Padayachee, V. (2009). Measuring Inflation Credibility : Results of a. *South African Journal of Economics*, 77(June), 314–331.
- Sardar, Z. V. B. (1997). *Introducing cultural studies* (Print book). London : Icon,.
- Shirwa, H. A. (2020). *Convergence of Corporate Governance Models: The Arguments in Favor and Against its Possibility*.
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. In *K-Media*.
- Wahyuni, E. (2015). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Ekp*, 13.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan - Google Buku*. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=front>

cover&hl=id#v=onepage&q&f=false